BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa transisi ini, remaja akan mengalami ketidaksetabilan emosi maupun jiwa karena proses pencarian jati diri. Ketidaksetabilan ini tidak lain disebabkan oleh masuknya pengaruh baru yang mengakibatkan seorang remaja mengalami kebingungan untuk memilah pergaulan sehingga rentan mengalami ketidaksetabilan jiwa. Dalam situasi yang seperti ini, apabila seorang remaja salah dalam menanggapi pengaruh yang masuk, maka mengakibatkan seorang remaja cenderung salah dalam bergaul sehingga rentan menimbulkan suatu perbuatan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang sering dikatakan sebagai kenakalan remaja (Goklan, 2014:1).

Kenakalan remaja merupakan salah satu isu sosial yang hangat diperbincangkan diberbagai media massa seperti: TV, radio, majalah, koran dan berbagai macam media massa lainnya yang menampilkan beragam perbuatan menyimpang sosial seperti: perkelahian, tawuran, seks bebas, pencurian sampai dengan penyalahgunaan narkoba. Dari beberapa contoh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja tersebut telah memberikan gambaran bahwa remajayang dipercaya sebagai subjek pembangunan nasional yang merupakan pilar terpenting sebagai agen perubahan (*agent of change*) untuk masa depan bangsa yang lebih baik justru berpotensi menjadi ancaman ketahanan nasional akibat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum.

Perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum seringkali dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau sebuah perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pelaku juga dianggap sebagai seseorang yang berbahaya dan menakutkan bagi orang lain sehingga tidak jarang pelaku diberi stigma negatif dalam kehidupan masyarakat. Hal yang dikhawatirkan adalah, ketika pelaku penyimpangan dilakukan oleh seorang remaja yang masih dibawah umur atau dikategorikan sebagai anak namun sudah dewasa secara psikologis. Tindakan masyarakat yang memberikan sebuah stigma negatif bagi anak tersebut mengakibatkan sebuah trauma tersendiri sehingga anak tersebut mengalami sebuah gangguan mental dan berpotensi merusak masa depan anak bahkan mengakibatkan sebuah kecenderungan bagi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kategori seorang remaja yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga harus berhadapan dengan hukum haruslah dibatasi karena berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, remaja masih dapat dikategorikan sebagai anak yang dianggap masih belum cakap hukum. Untuk masyarakat Indonesia batasan usia remaja adalah usia 11-24 tahun atau belum menikah, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Sarwono, 2012:18-19).

- a. Usia 11 tahun adalah usia ketika tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik).
- b. Usia 11 tahun dianggap akil balig, baik menurut adat maupun agama sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai remaja-remaja (kriteria sosial).

- c. Pada usia tersebut mulai timbul penyempurnaan suatu perkembangan jiwa seperti tercapainya suatu identitas diri, tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual, dan tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral (kriteria psikologis).
- d. Batas usia 24 tahun merupakan batas usia maksimal, yang secara adat dan tradisi dapat diartikan sebagai batasan usia ketika seseorang sudah mampu untuk menghasilkan pendapatan sendiri dan tidak menggantungkan diri pada orang tua.

Adapun kategori seorang remaja yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) tepatnya pada Pasal 1 Ayat 3 yang mengatur, “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan pengertian tersebut, adapun subjek remaja dalam penelitian ini adalah remaja yang telah berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan umur 17 (tujuh belas tahun) yang sah berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianggap masih dibawah umur menurut ketentuan dari negara termasuk juga remaja yang mengacu pada undang-undang yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya selain memuat tentang kejahatan yang dilakukan oleh remaja, juga memuat tentang faktor-faktor pendorong kejahatan yang dilakukan oleh remaja, upaya penyelesaian, perlindungan sampai dengan upaya

penanggulangan serta pencegahan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, orang tua dan juga aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja (Resi, 2019: 1-2).

Terkhusus pada tindak pidana penyalahgunaan narkotikayang merupakan salah satu kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), saat ini menjadi ancaman yang cukup besar bagi kaum remaja, remaja yang sedang berada dalam fase mencari jati diritentunya memiliki tingkat rasa keingintahuan yang cukup tinggi sehingga berpotensi besar sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, mudahnya pengedaran narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab juga semakin mempermudah seorang pengedar untuk mendapatkan mangsanya. Misalnya seorang pengedar akan mencari mangsanya di sekolah, tempat-tempat nongkrong, tempat hiburan malam, dll(Wulan, 2018:2).

Secara umum, penyalahgunaan narkotika telah dilarang berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) yang mengatur,“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Berdasarkan bunyi dari pasal tersebut, berarti bahwa selain digunakan dalam kepentingan pelayanan kesehatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan narkotika dilarang untuk digunakan oleh masyarakat umum. Apabila narkotika masih tetap digunakan tanpa adanya pengawasan dokter dan digunakan bukan untuk

kepentingan pengetahuan dan teknologi, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika (Chartika, 2017:106).

Adapun yang dimaksud dengan penyalahguna berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Narkotika mengatur, “Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Kemudian menurut (Manafe, 2012:4) menyatakan bahwa “Penyalahgunaan narkotika adalah masalah perilaku sosial, sehingga perlu pemberian informasi atau pengetahuan yang harus didukung oleh upaya pendidikan kepada anak-anak semenjak usia dini sehingga mampu untuk mengubah perilaku dan pola pikir anak, selain membimbing anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa”.

Sedangkan pengertian dari Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 mengatur,

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Adapun golongan-golongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika tepatnya pada Pasal 6 Ayat 1 yang mengatur,

“narkotika dapat digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyalahguna narkotika merupakan seseorang yang menyalahgunakan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum telah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam hal ini, penyalahguna narkotika dapat pula diartikan sebagai seseorang yang dengan sadar atau dengan maksud dan tujuan tertentu menggunakan narkotika dalam kurun waktu tertentusehingga menjadi ketergantungan dan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial dan spiritual pada diri seseorang yang menggunakannya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa yang dilakukan dalam bentuk penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan penggunaan obat. Gangguan ini sering ditemukan pada usia remaja dan dewasa muda yang sering menimbulkan suatu keresahan bagi orang tua, pendidik maupun masyarakat. Karena penyalahgunaan obat ini sering mengakibatkan kerugian bagi kesehatan jasmani maupun mental pelakunya, keluarga, masyarakat maupun negara (Serikat, 2016 : 170-171).

Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi, saat ini sedang memasuki zona merah penyalahgunaan narkotika terhitung semenjak bulan desember tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2020 akibat melonjaknya penyalahguna narkotika yang direhabilitasi dari tahun ketahun (Izarman, 2016). Adapun peningkatan kasus penyalahguna narkotika di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel A.01
Data Jumlah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Pelaku Remaja
1.	2016	47	24
2.	2017	54	25
3.	2018	55	28
4.	2019	48	19
5.	2020	47	27

Sumber : Data tahunan kasus penyalahgunaan narkotika dari Satuan Res. Narkoba Kepolisian Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penyalahguna narkotika di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami sebuah peningkatan. Dan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jumlah pelaku penyalahguna narkotika di Kabupaten Buleleng tidak mengalami sebuah penurunan yang signifikan yang artinya bahwa jumlah kasus per-tahunnya cenderung sama atau berbeda tipis dengan tahun sebelumnya. Bahkan parahnya, pada tahun 2020 jumlah penyalahguna narkotika di Kabupaten Buleleng sudah mencapai 47 kasus padahal belum menginjak bulan Desember.

Dari sekian banyaknya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng, dapat dilihat juga bahwa setengah lebih pelaku penyalahguna narkotika didominasi oleh kaum remaja yang didapat berdasarkan informasi dari Website Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang menyatakan bahwa setengah lebih pelaku penyalahguna narkotika di Kabupaten Buleleng didominasi oleh usia remaja umur 14-18 tahun yang masih duduk di bangku sekolah atau masih mengenyam pendidikan (Pemkab Buleleng, 2018).

Tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng pada usia remaja mengakibatkan kekhawatiran masyarakat semakin besar akibat

dampaknya yang berpotensi merusak ke segala dimensi kehidupan seperti dimensi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dampak penyalahgunaan narkoba oleh remaja yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan perbuatan baik dan buruk, anti sosial (perilaku *maladaptive*), gangguan kesehatan (fisik dan mental), maraknya tingkat kekerasan dan perilaku melanggar lalu lintas serta masih banyak lagi perilaku kriminalitas yang akan ditimbulkan (Mardani, 2007: 3).

Meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng juga mengakibatkan adanya suatu kebiasaan serta pengaruh yang semakin luas untuk generasi penerus selanjutnya. Lambat laun, apabila penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja ini tidak bisa dikendalikan, maka perilaku menyimpang sosial ini akan semakin meluas serta turun menurun akibat semakin mudahnya akses dalam mengedarkan narkoba serta maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja yang mengundang mudahnya narkoba untuk masuk ke kehidupan para remaja.

Permasalahan ini cukup riskan mengingat remaja memiliki pengaruh yang cukup kuat di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, peran serta dari keluarga, masyarakat dan juga pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanamkan karakter dan moral yang positif bagi para remaja. Selain itu, menggali secara lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba juga sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi para orang tua, masyarakat serta pemerintah dalam menanamkan pendidikan karakter bagi para anak-anak sebelum memasuki usia remaja agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyebab dan faktor-faktor yang mendorong maraknya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng serta mengkaji tentang upaya dari penegak hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja di Kabupaten Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut.

1. Kenakalan remaja sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.
2. Penyalahgunaan narkoba sebagai kejahatan yang luar biasa (*ekstra ordinary crime*) paling sulit untuk diatasi dan berpotensi merusak moral masyarakat khususnya remaja sebagai generasi muda.
3. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh remaja pada setiap tahunnya terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
4. Maraknya angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng berpotensi merusak hubungan kekeluargaan, gangguan kesehatan, sampai dengan menurunkan kemampuan belajar pada diri seorang remaja.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti melakukan pembatasan pada ruang lingkup tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng. Penyajian data dihasilkan berdasarkan data yang ada pada lingkup Satuan Res. Narkoba Kepolisian Kabupaten Buleleng dan BNN Kabupaten Buleleng terkait remaja yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng serta upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng. Adapun uraian tentang pembatasan masalah bahasannya yaitu mengenai faktor-faktor penyebab remaja yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu.

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji serta menganalisis terkait faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengkaji serta menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap akan dapat memberikan manfaat.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional khususnya tentang Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja di Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Remaja di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih pemikiran maupun menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum khususnya Satuan Res. Narkoba Kepolisian Kabupaten Buleleng dan BNN Kabupaten Buleleng dalam mengoptimalkan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika.

c. Bagi Masyarakat

Sarana pengembangan Ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja di Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai upaya peningkatan keahlian meneliti dan menulis, sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan hukum serta sebagai bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum.